



Jurusan Akuntansi Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia



Jurnal Akuntansi Multiparadigma

www.jamal.ub.ac.id



## APAKAH TEORI KECURANGAN HEXAGON EFEKTIF MENCEGAH MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN BUMN?

Mettania Kirana\*, Nagian Toni, Adam Afiezan, Enda Noviyanti Simorangkir

Universitas Prima Indonesia, Jl. Sampul No.4, Sei Putih Bar., Medan 20118

\*Korespondensi: mettania2@gmail.com

Volume 14  
Nomor 1  
Halaman 87-97  
Malang, April 2023  
ISSN 2086-7603  
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:  
**23 Desember 2022**

Tanggal Revisi:  
**14 Mei 2023**

Tanggal Diterima:  
**15 Mei 2023**

### Kata kunci:

arogansi,  
laporan keuangan,  
rasionalisasi,  
teori kecurangan  
hexagon

### Mengutip ini sebagai:

Kirana, M., Toni, N., Afiezan, A., & Simorangkir, E. N. (2023). Apakah Teori Keruangan Hexagon Efektif Mencegah Manipulasi Laporan Keuangan Perusahaan BUMN? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(1), 87-97. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2023.14.1.06>

© 2023 Mettania Kirana, Nagian Toni, Adam Afiezan, Enda Noviyanti Simorangkir



### Abstrak – Apakah Teori Kecurangan Hexagon Efektif Mencegah Manipulasi Laporan Keuangan Perusahaan BUMN?

**Tujuan Utama** – Penelitian dilakukan untuk menguji faktor yang memengaruhi kecurangan laporan keuangan berdasarkan teori kecurangan hexagon.

**Metode** – Penelitian ini menggunakan metode *partial least squares*. Sampel penelitian adalah 17 perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2017—2021.

**Temuan Utama** – Tiga unsur teori kecurangan hexagon relevan terhadap terjadinya penyimpangan laporan keuangan. Pengujian membuktikan manipulasi laporan keuangan disebabkan adanya unsur tekanan, rasionalisasi, dan arogansi. Meskipun demikian, komite audit tidak mampu memoderasi elemen kecurangan hexagon sebagai pemicu terjadinya penyimpangan laporan keuangan.

**Implikasi Teori dan Kebijakan** – Perusahaan BUMN perlu mewaspadaikan tekanan eksternal manajemen, pergantian auditor eksternal, dan jumlah foto CEO dalam laporan tahunan sebagai indikasi terjadinya kecurangan. Hal demikian juga harus diperhatikan investor dengan mengukur risiko salah saji laporan keuangan.

**Kebaruan Penelitian** – Penelitian ini menambahkan variabel komite audit sebagai moderasi dengan penekanan teori kecurangan hexagon.

### Abstract – Is Hexagon Fraud Theory Relevant in SOE Financial Statements Fraud?

**Main Purpose** – This study was conducted to examine the factors that influence financial statements fraud based on the hexagon fraud theory.

**Method** – This study uses the partial least squares method. The sample is 17 state-owned companies (SOE) listed in the Indonesia Stock Exchange during 2017—2021.

**Main Findings** – Three elements of the hexagon fraud theory are relevant to the occurrence of financial statement irregularities. Tests prove that financial statement manipulation is due to elements of pressure, rationalization, and arrogance. Nonetheless, the audit committee was unable to moderate the element of hexagon fraud.

**Theory and Practical Implications** – SOE need to be aware of external management pressure, changes in external auditors and the number of CEO photos in annual report as indications of fraud. Investors must also pay attention to this by measuring the risk of financial statement misstatement.

**Novelty** – This research adds the audit committee variable as a moderation with an emphasis on the hexagon fraud theory.

Laporan keuangan mencerminkan peningkatan efektivitas kemampuan perusahaan sehingga memicu perilaku *fraud* guna menarik para penanam modal. *Statement of Auditing Standards* No. 99 menyebutkan kecurangan merupakan perilaku menyusun laporan keuangan secara salah saji material yang dilakukan dengan unsur sengaja. Penyimpangan laporan keuangan merupakan skema kecurangan dengan kasus yang paling sedikit secara global. Namun, hal tersebut memiliki dampak ekonomi yang sangat besar. Kecurangan keuangan ini juga berdampak bagi laju perekonomian negara yang menjadi tidak efisien akibat peningkatan *cost of doing business*. Perusahaan BUMN merupakan alat pemerintahan dalam menata kebijakan perekonomian nasional. Kendati demikian, perusahaan BUMN menjadi area rawan terjadinya tindak kecurangan. Beberapa perusahaan BUMN diketahui melakukan *window dressing* untuk memperindah kinerja perusahaan di mata para investor yang dilakukan dengan ketidaksesuaian pencatatan peningkatan akun pendapatan terhadap peningkatan laba bersih.

Teori kecurangan hexagon dicetuskan oleh Vousinas pada tahun 2016. Teori ini digolongkan menjadi enam komponen berupa stimulus, peluang, rasionalisasi, kemampuan, ego, serta kolusi. Faktor stimulus memicu sebuah motivasi untuk melakukan kecurangan, baik tekanan dari diri sendiri maupun tekanan eksternal dari pihak lain (Albizri et al., 2019; Nasir et al., 2018; Ramadhan & Mulyati, 2022). Faktor peluang merupakan kondisi pengendalian internal yang lemah disebabkan ketidakefektifan pengawasan dan kualitas perusahaan (Elnahas et al., 2017; Johnson et al., 2021). Faktor rasionalisasi adalah sikap atau pemikiran seseorang untuk membenarkan tindakan kecurangan sebagai hal wajar (Kusumawati et al., 2021). Rasionalisasi terjadi pada saat kondisi pergantian auditor, opini audit, dan rasio total akrual. Faktor kemampuan dilakukan oleh orang yang kompeten seperti kondisi pergantian direksi yang mampu memicu terjadinya kecurangan dengan nominal besar (Sari et al., 2022). Faktor arogansi mencakup sikap superioritas CEO atas jabatan tinggi untuk tidak selalu mematuhi kebijakan internal perusahaan yang tercermin dari kuantitas foto CEO dalam laporan tahunan serta hubungan kekeluargaan dalam perusahaan (Apriliana & Agustina, 2017). Faktor kolusi mencakup hubungan kedekatan antara pihak jajaran perusahaan dengan pemerintah untuk mempermudah proses perizinan dan penguasaan pinjaman dana (Vousinas, 2019).

Pengujian penyimpangan pada laporan keuangan telah banyak dilakukan di antaranya Sahla & Ardianto (2022), Sari et al. (2022), serta Setiawati & Baningrum (2018) yang mengutarakan bahwa indikasi penyimpangan pelaporan keuangan tidak dipengaruhi oleh ketidakefektifan pengawasan, perubahan auditor, perubahan direksi, serta kuantitas foto CEO. Hal ini memberikan *gap* terhadap kecurangan hexagon *theo-*

*ry* sehingga menunjukkan bahwa faktor pemicu terjadinya manipulasi pelaporan keuangan dalam literatur masih belum jelas. Elemen kecurangan hexagon dikatakan tidak berpengaruh karena tidak cukup menentukan perusahaan tersebut terindikasi penyimpangan atau tidak pada saat penyusunan laporan keuangan. Pernyataan ini menarik peneliti untuk menganalisis lebih lanjut apakah terdapat faktor lain pemicu penyimpangan laporan keuangan. Selain itu, penelitian terkait kecurangan hexagon masih minim dan terbatas dalam jurnal terindeks, baik secara nasional maupun internasional.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sari et al. (2022) menggunakan model beneish atau model stubben. Adapun penelitian terdahulu yang menerapkan teori kecurangan yakni *fraud diamond* (Khamainy et al., 2022; Ratmono & Frendy, 2022) atau *fraud pentagon* (Aboud & Robinson, 2022; Hamilton & Smith, 2021; Sahla & Ardianto, 2022) akan memberikan perbedaan temuan riset dari berbagai sektor lain. Oleh karena itu, penelitian ini mengimplementasikan teori kecurangan terbaru yaitu kecurangan hexagon dengan model *F-score* yang jarang digunakan untuk mendeteksi indikasi manipulasi pelaporan keuangan dengan kualitas akrual. Perusahaan berusaha menampilkan laporan keuangan yang sehat kepada para pemegang kepentingan, salah satunya dengan meningkatkan kualitas akrualnya. *F-score* model dikenal sebagai alat pendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan dengan membandingkan kualitas akrual untuk mengetahui seberapa efisien perusahaan menghasilkan pendapatan. Dalam riset ini, komite audit digunakan sebagai pemoderasi untuk mengetahui peran komite audit sebagai dewan pengawas untuk mampu meminimalisasi kecurangan laporan keuangan. Berbeda dengan riset sebelumnya yang menggunakan pengukuran rasio, variabel komite audit dihitung menggunakan variabel *dummy* dengan harapan dapat menjadi terobosan baru sebagai pengukuran yang lebih efektif dibandingkan sebelumnya.

Tujuan riset ini adalah untuk menguji indikasi kecurangan laporan keuangan berdasarkan analisis kecurangan hexagon pada perusahaan BUMN. Penelitian ini berkontribusi bagi dunia akuntansi dengan menambah bukti empiris terhadap kecurangan hexagon terkait pendeteksian kecurangan laporan keuangan. Penggunaan model penelitian dengan indikator berbeda akan memberikan perbedaan hasil yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan perusahaan dalam memaksimalkan pengendalian internal. Dengan demikian, penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan dengan jujur dan andal sesuai ketentuan yang berlaku di masa yang akan datang.

## METODE

Riset ini menggunakan populasi mencakup seluruh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) masa 2017—2021 sebanyak 20 perusahaan

**Tabel 1. Kualifikasi Pengambilan Sampel**

Kualifikasi Sampel	Jumlah
Perusahaan BUMN yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia masa 2017—2021	20
Perusahaan BUMN dengan laporan tahunan yang tidak dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia masa 2017—2021	-3
Jumlah Perusahaan	17
<b>Total Laporan Keuangan</b>	<b>85</b>

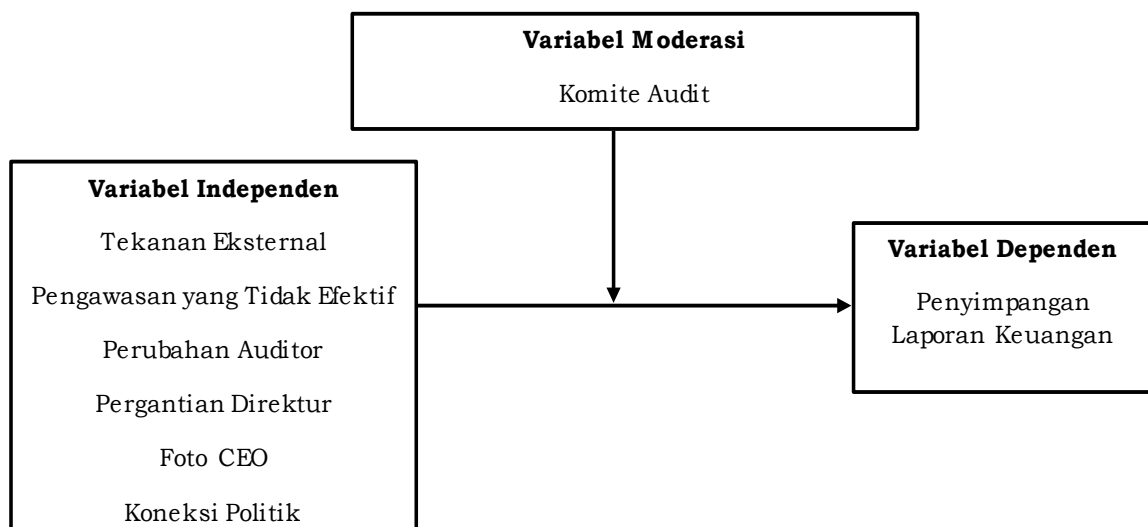
(lihat Tabel 1). Adapun pemilihan sampel pada Tabel 1 dilakukan dengan mengingat peran penting perusahaan BUMN sebagai penopang perekonomian negara. Perusahaan BUMN didominasi dan diatur langsung oleh pemerintahan yang dapat mengarah ke penyimpangan laporan keuangan. Hal ini memengaruhi transparansi pada laporan keuangan BUMN dan penipuan akuntansi secara umum. Pemilihan sampel memakai metode *non random purposive sampling* yaitu pemenuhan kualifikasi tertentu untuk pengambilan sampel.

Analisis data riset menerapkan alat statistik *Partial Least Squares* (PLS). Berdasarkan kerangka konseptual pada Gambar 1, Berdasarkan Gambar 1, model persamaan yang terbentuk adalah:

$$\begin{aligned}
 RSST = & \alpha + \beta_1 LEV + \beta_2 BDOU + (i) \\
 & \beta_3 CIA + \beta_4 DCHANGE + \\
 & \beta_5 CEOPICT + \beta_6 POLCON + \\
 & \beta_7 LEV * UCOM + \beta_8 BDOU * \\
 & AUCOM + \beta_9 CIA * AUCOM \\
 & + \beta_{10} DCHANGE * AUCOM \\
 & + \beta_{11} CEOPICT * AUCOM + \\
 & \beta_{12} POLCON * AUCOM + e
 \end{aligned}$$

Berdasarkan persamaan analisis ini, peneliti akan menjabarkan masing-masing variabel. *Financial statement fraud* (RSST) merupakan suatu perilaku manipulasi dengan mengubah pengungkapan menjadi tidak sesuai kondisi sebenarnya dan akan memengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan (Khamainy et al., 2022). SAS No. 99 menyatakan bahwa manipulasi laporan keuangan dilakukan dengan pemalsuan, kekeliruan yang disengaja (kelalaian), dan penyalahgunaan prinsip secara sengaja. Kecurangan pelaporan keuangan mengacu pada riset Kusumawati et al. (2021) yang dihitung menggunakan model F-score yaitu mengalkulasikan posisi keuangan perusahaan dengan total akrual korporasi. Tingginya nilai *-F-score* menunjukkan kemungkinan adanya penyimpangan pada laporan keuangan yang semakin tinggi (Apriliana & Agustina, 2017).

Cakupan teori kecurangan hexagon oleh Vousinas (2019) tergolong menjadi enam point yaitu stimulus, peluang, kemampuan, rasionalisasi, arogansi, serta kolusi. Pertama, tekanan eksternal sebagai proksi dari stimulus diukur menggunakan rasio *leverage* (LEV) dengan menilai kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya menggunakan seluruh asetnya



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

(Sari et al., 2022). Kewajiban perusahaan jika dibandingkan dengan keseluruhan asetnya menjelaskan semakin besar tekanan pemicu pihak manajemen melakukan manipulasi (Puspita et al., 2021; Zhou et al., 2018).

Kedua, variabel pengawasan (BDOUT) yang tidak efektif sebagai proksi peluang diukur dengan rasio perbandingan jumlah dewan komisaris independen dan seluruh komisaris perusahaannya (Setiawati & Baningrum, 2018). Kehadiran dewan komisaris independen sebagai pengawas akan memperkuat efektivitas pengawasan. Pengawasan yang semakin efektif menunjukkan semakin kecil tingkat kecurangan yang terjadi (Aksa et al., 2020; Wardani & Susilowati, 2020; Wei et al., 2017).

Ketiga, pengukuran pergantian auditor (CIA) dengan variabel *dummy* berupa pemberian kode 0 jika tidak mengganti kantor akuntan publik dan kode 1 jika mengganti kantor akuntan publik (Aboud & Robinson, 2022; Hamilton & Smith, 2021; Sari et al., 2022). Pergantian auditor merupakan wujud dari rasionalisasi dengan menutupi atau menghancurkan bukti temuan kecurangan oleh auditor terdahulu dengan mengganti auditor independennya. SAS No. 99 menjelaskan perubahan auditor eksternal menjadi faktor pemicu timbulnya penyelewengan pada laporan keuangan.

Keempat, pengukuran pergantian direksi (DCHANGE) dengan variabel *dummy* yaitu pemberian kode 0 jika tidak mengganti direksi dan kode 1 jika mengganti direksi (Hamilton & Smith, 2021; Sari et al., 2022). Pergantian ini dilakukan dengan menyerahkan wewenang kepada direksi baru guna perbaikan kinerja manajemen korporasi terdahulu. Waktu untuk beradaptasi bagi direktur baru menyebabkan tidak maksimalnya kinerja. Situasi ini akan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan kecurangan.

Kelima, total foto CEO (CEOPICT) dilakukan dengan menghitung seluruh gambar CEO yang dicetak dalam annual report baik di profil anggota perusahaan, rapat RUPS, maupun kegiatan perusahaan (Aboud & Robinson, 2022; Hamilton & Smith, 2021; Sari et al., 2022). Setiap CEO berkeinginan untuk menampilkan status dan jabatannya dalam laporan keuangan agar semakin dikenal masyarakat. Banyaknya foto CEO di laporan tahunan berefek pada sikap CEO menjadi semakin arogan. CEO dapat melewati peraturan dan pengendalian internal perusahaan dikarenakan status dan jabatannya yang tinggi sehingga memicu terjadinya kecurangan (Setiawati & Baningrum, 2018).

Variabel independen terakhir adalah koneksi politik (POLCON) sebagai elemen kolusi diukur dengan variabel *dummy* yaitu kode 1 diberikan jika komisaris terkoneksi politik dengan rangkap jabatan sebagai politisi yang berkaitan dengan partai politik, pemerintah, atau militer, serta kode 0 diberikan jika komisaris perusahaan tidak ter-

koneksi politik dengan rangkap jabatan sebagai politisi yang berhubungan dengan partai politik, pemerintah, atau militer (Sahla & Ardianto, 2022). Metode ini dilakukan sebagai terobosan baru untuk melihat apakah pengukuran ini cukup efektif untuk mendeteksi penyimpangan laporan keuangan. Koneksi politik dilihat dari jalinan interaksi yang dekat antara pihak korporasi dengan pemerintah (pejabat publik atau politisi) yang membawa keuntungan bagi perusahaan dalam perizinan dan pinjaman dana (Vousinas, 2019). Hak istimewa ini akan memotivasi manajemen untuk memanipulasi pencatatan laporan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan pengukuran rasio, komite audit (AUCOM) sebagai moderasi diukur dengan variabel *dummy* yaitu kode 1 jika mengganti komite audit dan kode 0 jika tidak mengganti komite audit (Brazel, 2018; Elnahas et al., 2017; Sari et al., 2022). Tanggung jawab komite audit terhadap dewan komisaris terletak pada fungsi pengawasan serta membantu tugas dewan komisaris. Penerapan *good corporate governance* yang efektif akan mengikutsertakan komite audit dalam struktur anggota korporasi. Komite audit juga berkewajiban mengawasi agen untuk bekerja sesuai dengan peraturan yang ada dan mencegah terjadinya masalah kepentingan antara agen dan pemegang kepentingan. Komite audit berhubungan erat dengan auditor eksternal karena komite audit yang merekomendasikannya kepada dewan direksi (Johnson et al., 2021). Sebagai pihak pertama yang memperoleh laporan audit independen, komite audit bertugas untuk membandingkannya dengan laporan internal perusahaan. Pengendalian internal perusahaan serta fungsi kontrol tindakan manajemen saat penyusunan pelaporan keuangan dilakukan oleh komite audit untuk mencegah terjadinya kecurangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 menunjukkan hasil pengujian regresi. Berdasarkan Tabel 2, persamaan yang terbentuk adalah:

$$\begin{aligned} \text{RSST} = & 0,115 - 0,162\text{LEV} + (i) \\ & 0,043\text{BDOUT} + 0,202\text{CIA} \\ & - 0,081\text{DCHANGE} + \\ & 0,228\text{CEOPICT} - 0,049\text{POLCON} \\ & - 0,031\text{LEV} * \text{UCOM} \\ & + 0,006\text{BDOUT} * \text{AUCOM} \\ & + 0,072\text{CIA} * \text{AUCOM} - \\ & 0,069\text{DCHANGE} * \text{AUCOM} \\ & + 0,050\text{CEOPICT} * \text{AUCOM} \\ & - 0,022\text{POLCON} * \text{AUCOM} \\ & + e \end{aligned}$$

Hasil pada Tabel 2 dan persamaan hasil pengujian menunjukkan bahwa pergantian auditor dan foto CEO memberikan efek positif bagi penyimpangan laporan keuangan. Selain itu, tekanan kepada pemimpin justru mampu mem-

Tabel 2. Hasil Pengujian Regresi

Inisial Variabel	Nilai Pengujian
Konstanta	0,115
LEV	-0,162** (2,108)
BDOUT	0,043 (0,380)
CIA	0,202** (2,325)
DCHANGE	-0,081 (0,830)
CEOPICT	0,228** (2,683)
POLCON	-0,049 (0,308)
LEV*AUCOM	-0,031 (0,266)
BDOUT*AUCOM	0,006 (0,048)
CIA*AUCOM	0,072 (0,628)
DCHANGE*AUCOM	-0,069 (0,918)
CEOPICT*AUCOM	0,050 (0,371)
POLCON*AUCOM	-0,022 (0,148)

berikan efek negatif bagi penyimpangan laporan keuangan. Pada sisi lainnya, komite audit belum mampu memberikan efek bagi pentimpangan laporan keuangan.

Bagian selanjutnya adalah hasil pengujian koefisien jalur pada Tabel 2 dan pemaparannya. Tekanan eksternal memberikan dampak secara negatif terhadap indikasi kecurangan pada pelaporan keuangan. Hal ini karena besarnya jumlah tambahan dana yang ditetapkan pemegang kepentingan dinilai wajar dan mampu dipenuhi oleh manajemen. Selain itu, tingginya rasio *leverage* akan meningkatkan pengawasan kreditor karena manipulasi saldo hutang dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar hingga mengalami kebangkrutan. Adapun sumber pendanaan lain juga dapat dipenuhi melalui penerbitan saham baru sebagai tambahan modal (Koong et al., 2017). Manajemen yang mampu memenuhi ekspektasi pemegang kepentingan cenderung bersikap jujur dan tidak memperoleh tekanan untuk melakukan penyimpangan pada laporan keuangan.

Hasil penelitian membuktikan poin stimulus pada teori kecurangan hexagon yaitu tekanan eksternal memberikan motivasi kepada manajemen untuk melakukan kecurangan demi memenuhi tuntutan penanam modal. Hasil yang diperoleh juga konsisten dengan penelitian terdahulu yang mengemukakan bahwa tuntutan pihak luar memberikan dampak pada indikasi kecurangan atas laporan keuangan (Ratmono & Frendy, 2022). Zhou et al. (2018) mengungkapkan bahwa *leverage* yang tinggi secara signifikan terkait dengan kecurangan pada laporan keuangan perusahaan di China. Namun, hasil yang diperoleh tidak sejalan dengan temuan Salehi & Salami (2020) yaitu tidak ditemukannya dampak antara tekanan eksternal pada kemungkinan timbulnya hasrat memanipulasi laporan keuangan. Tekanan berlebihan yang dirasakan manajemen tidak serta merta mendorong untuk menambah kewajiban perusahaan. Sebaliknya, kewajiban tersebut dapat dipenuhi dengan sumber pendanaan lain sehingga manajemen tidak perlu melakukan praktik kecurangan. Oleh karena itu,

fiskus perlu mengecek akun lain pada catatan atas laporan keuangan untuk mengetahui informasi secara detail demi memastikan keandalan laporan keuangan tersebut.

Ketidakefektifan pengawasan tidak mempunyai efek terhadap pendeteksian kecurangan pada pelaporan keuangan. Hal ini dikarenakan pengangkatan anggota komisaris independen dilakukan sebagai pemenuhan ketentuan regulasi Bursa Efek Indonesia sebagaimana diatur dalam POJK tentang ketentuan jumlah minimum komisaris independen perusahaan paling sedikit 30% dari total anggota dewan komisaris. Keadaan ini berdampak pada kinerja pengawasan korporasi yang tidak berjalan dengan maksimal. Di sisi lain, peranan penting perusahaan berada dalam kendali pemegang saham sehingga berdampak pada kurang optimalnya kinerja dewan. Tujuan pemilihan dewan komisaris independen tidak dilakukan untuk menerapkan *good corporate governance* demi meminimalisasi terjadinya tindakan salah saji laporan keuangan. Hasil riset tidak dapat membuktikan poin peluang pada teori kecurangan hexagon yang menyatakan bahwa pengawasan yang tidak efektif membuka celah bagi beberapa oknum untuk melakukan penyimpangan pada pencatatan laporan keuangan.

Hasil riset selaras dengan temuan Murphy (2019), Setiawati & Baningrum (2018), dan Vousinas (2019) yakni persentase komisaris independen tidak mempunyai dampak pada penyelesaian laporan keuangan. Akan tetapi, temuan riset ini tidak sepeham dengan beberapa penelitian terdahulu yaitu *fraud* atas laporan keuangan dapat diminimalisasi dengan pengawasan yang efektif (Aksa et al., 2020; Wardani & Susilowati, 2020; Wei et al., 2017; Yang & Lee, 2020). Akomea-Frimpong et al. (2019) dan He et al. (2020) berpendapat bahwa potensi kecurangan disebabkan oleh sistem pengawasan internal dan kontrol keuangan yang lemah dengan pengawasan yang buruk di Ghana. Pengawasan operasional perusahaan yang efektif dan objektif oleh dewan komisaris independen akan mencegah terjadinya praktik *fraud* oleh pihak-pihak tertentu. Semakin banyak anggota dewan komisaris independen, maka semakin tinggi fungsi pengamatan kinerja perusahaan (Sahdan et al., 2020). Pengawasan yang efektif oleh dewan yang profesional akan memberikan kemudahan dalam mendeteksi adanya tindak kecurangan.

Pergantian auditor eksternal memberikan efek secara positif terhadap indikasi pelaporan keuangan yang curang. Hal ini dikarenakan pergantian kantor akuntan publik secara sukarela dapat menghilangkan atau menyembunyikan kecurangan laporan terdahulu sehingga dapat meningkatkan risiko kegagalan audit. Faktor utamanya adalah waktu yang dibutuhkan auditor baru untuk beradaptasi dapat menjadi celah bagi pelaku untuk menghilangkan jejak *fraud*. Dengan kata lain, jejak kecurangan akan lebih mu-

dah ditemukan oleh auditor lama karena sudah mengetahui seluk-beluk korporasi selama beberapa tahun. Hal tidak wajar yang ditemukan oleh auditor terdahulu akan ditutupi perusahaan dengan mengganti auditor eksternal dengan kualitas auditor yang lebih rendah.

Hasil ini konsisten dengan teori kecurangan hexagon pada poin rasionalisasi yaitu membenaran atas sikap kecurangan sebagai hal yang wajar akan meningkatkan risiko penyimpangan laporan keuangan. Selain itu, hasil ini juga konsisten dengan teori kecurangan hexagon pada poin rasionalisasi yaitu membenaran atas sikap kecurangan sebagai hal yang wajar akan meningkatkan risiko penyimpangan laporan keuangan. Temuan uji ini juga sependapat dengan temuan Aksa et al. (2020) dan Nigrini (2019) yang berhasil mengungkapkan adanya dampak perubahan auditor dalam mendeteksi terjadinya kecurangan pelaporan. Namun, pendapat ini bertolak belakang dengan temuan Sahla & Ardianto (2022) yang mengungkapkan bahwa kecurangan pelaporan tidak disebabkan oleh perubahan auditor. Pergantian auditor dilakukan berdasarkan penyelesaian kontrak atau karena adanya masalah lain seperti *fee audit* sebelumnya yang terlalu tinggi atau ketidakpuasan atas kinerja auditor sebelumnya. Oleh karena itu, perusahaan harus mengungkapkan alasan pergantian auditor eksternal secara jelas untuk mengurangi kecurigaan fiskus bahwa perusahaan melakukan tindak kecurangan.

Pergantian direksi tidak memberikan dampak terhadap risiko terjadinya kecurangan pada pelaporan. Pergantian direksi dalam perusahaan dilakukan untuk menemukan direksi baru yang lebih andal dan kompeten dengan harapan peningkatan efektivitas dan perbaikan kinerja perusahaan. Pergantian direksi juga dapat dilakukan karena direksi telah pensiun atau meninggal dunia (Cuganesan & Free, 2021; Hidayah & Rahmawati, 2019; Oats & Tuck, 2019). Temuan ini tidak dapat membuktikan teori kecurangan hexagon pada poin kompetensi yaitu orang yang memiliki kemampuan profesional akan meningkatkan risiko terjadinya kecurangan pada laporan keuangan.

Hasil ini selaras dengan temuan Ratmono & Frendy (2022) dan Setiawati & Baningrum (2018) yaitu perubahan direksi tidak memberikan dampak terhadap terjadinya manipulasi pelaporan keuangan. Namun, pendapat berbeda diungkapkan dalam penelitian Sahla & Ardianto (2022), Siahaan et al. (2023), dan Vousinas (2019) yaitu adanya dampak perubahan direksi sebagai dorongan pencatatan laporan keuangan yang curang. Masa adaptasi direksi baru untuk memahami situasi perusahaan dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk melakukan penyimpangan. Pada umumnya, perusahaan tidak memberikan pernyataan yang jelas atas pergantian direksi pada laporan tahunan (Av-

ery, 2020; Sun et al., 2017). Maka dari itu, perusahaan perlu menjelaskan sebab dan alasan pergantian direksi pada laporan tahunan untuk mengurangi kecurigaan fiskus.

Jumlah wajah CEO membawa efek secara positif terhadap indikasi pelaporan keuangan yang curang. Banyaknya gambar CEO pada laporan tahunan mampu meningkatkan rasa arogan atas jabatannya yang tinggi untuk menghindari peraturan perusahaan. Sifat superioritas sebagai pihak yang paling berkuasa di perusahaan menyebabkan CEO mampu berperilaku sewenang-wenang dan berpotensi besar untuk melakukan penyimpangan demi keuntungan pribadi.

Pengendalian internal tidak berlaku bagi CEO atas dasar tingginya jabatan dan status dalam perusahaan (Tu & Turner, 2019). Teori kecurangan hexagon pada elemen arogansi berhasil dibuktikan pada pengujian ini yang sejalan dengan riset Apriliana & Agustina (2017) dan Sahla & Ardianto (2022) yaitu adanya efek positif yang terjadi di antara total gambar CEO terhadap *fraud* pada laporan tahunan. Akan tetapi, ungkapan berbeda dinyatakan oleh Marriott & Sim (2017) yang mendeteksi bahwa tampilan wajah CEO di laporan tahunan hanya sebagai pengenalan di profil sehingga tidak menimbulkan sifat arogansi. Foto CEO ditampilkan sebagai pengenalan petinggi pada struktur organisasi perusahaan kepada masyarakat (Scotter et al., 2018; Skidmore et al., 2020).

Adapun, gambar CEO sebagai penanggung jawab dalam perusahaan di mana aktivitas yang dilakukan secara transparan disajikan pada laporan tahunan. Sifat arogansi tidak dapat dideteksi dari kuantitas foto CEO pada laporan tahunan, melainkan dilihat pada profil dan prestasi yang dicapai untuk menilai cara dan sikap kepemimpinan dalam perusahaan.

Koneksi politik tidak berdampak terhadap pendeteksian kecurangan pada pelaporan. Pihak manajemen yang terkoneksi politik tidak menyalahgunakan hubungan untuk kepentingan pribadi sehingga tidak berdampak pada pencegahan penyimpangan atas laporan keuangan. Perusahaan berusaha menyajikan laporan keuangan secara jujur demi menjaga reputasi atau hubungan baik dengan pemerintahan. Dengan harapan, perusahaan dapat memperoleh pertolongan dalam mengatasi situasi krisis ke depannya.

Teori kecurangan hexagon pada elemen arogansi tidak berhasil dibuktikan pada penelitian ini. Komisaris yang memiliki hubungan dengan pemerintahan tidak menyalahgunakan kedekatannya untuk melakukan penyimpangan. Temuan ini didukung oleh riset sebelumnya yang membuktikan bahwa kolusi yang diprosikan dengan hubungan politik tidak mempunyai efek pada pemalsuan pelaporan keuangan (Chen & Tsai, 2018; Sahla & Ardianto (2022). Namun, temuan penelitian ini bertolak belakang dengan riset yang dilakukan oleh Vousinas (2019) ya-

itu perusahaan yang terkoneksi politik memiliki kemudahan dalam memperoleh dana pinjaman. Keadaan ini menjadi dorongan manajemen untuk melakukan penyimpangan dalam penyusunan laporan keuangan. Kekuatan hubungan politik dimanfaatkan dewan komisaris untuk mengatasi kesulitan perusahaan. Oleh karena itu, komisaris perlu menjaga citra yang baik dari isu-isu negatif di masyarakat untuk menghilangkan kecurigaan dan mendapatkan kepercayaan publik.

Komite audit gagal menjadi pemoderasi antara pengaruh tekanan eksternal pada kecurangan penyusunan laporan. Teori keagenan menjelaskan peran komite audit sebagai tangan kanan dewan komisaris melaksanakan tugas pengawasan, memantau kinerja manajemen dalam mengoperasikan bisnis, serta membuat laporan keuangan. Demi performa laporan keuangan yang terlihat sehat, manajemen terdorong melakukan penyimpangan pada laporan keuangan untuk memuaskan pemilik modal. Eksistensi komite audit tidak cukup memperlemah tuntutan manajemen untuk melakukan penyimpangan pada laporan keuangan.

Sepanjang penelusuran penulis, tidak ditemukan riset yang menemukan adanya efek antara komite audit terhadap manipulasi pelaporan. Penemuan hasil uji memperlihatkan jenis moderasi yang terjadi adalah moderasi potensial atau homologizer moderator. Riset yang dilaksanakan Elnahas et al. (2017) dan Johnson et al. (2021) sepaham dengan pengujian ini yaitu komite audit tidak mampu berperan sebagai pemoderasi atas interaksi tekanan eksternal pada pemalsuan laporan keuangan. Oleh karena itu, komite audit perlu melakukan pengecekan secara mendalam dan berkala terhadap akun hutang, profit, dan piutang. Selanjutnya, komite audit juga perlu memperhatikan tingkah laku manajemen untuk mengetahui psikologis manajer akibat tekanan yang diterima.

Komite audit gagal berperan sebagai moderator antara pengaruh ketidakefektifan pengawasan pada pendeteksian kasus kecurangan dalam pelaporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh kurang objektifnya pengawasan sehingga menimbulkan intervensi antara komisaris independen dan komite audit. Adapun, banyaknya kuantitas komite audit menyebabkan penurunan profesionalitas dalam pendapat yang independen kepada dewan komisaris. Proporsi anggota komite audit tidak mengindikasikan penyimpangan dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena adanya peraturan regulator pasar modal yang menyatakan bahwa seluruh keanggotaan komite audit bersifat independen.

Temuan ini selaras dengan Murtando & Sandra (2019) yang mengungkapkan bahwa pendeteksian kecurangan pelaporan oleh ketidakefektifan pengawasan tidak diperlemah oleh komite audit. Maka dari itu, pembentukan komite audit independen dipercaya dapat meningkatkan keefektifan pengawasan dengan tujuan untuk

meminimalisasi terjadinya tindak kecurangan pada pelaporan keuangan. Keefektifan pengawasan komite audit dapat dilakukan dengan menerapkan *good corporate governance* yang efisien dan melaksanakan rapat sekurang-kurangnya tiga bulan sekali. Rapat diadakan untuk membahas sistem pengendalian internal dan masalah keuangan.

Komite audit gagal sebagai pemoderasi antara pengaruh pergantian auditor pada kecurangan penyusunan laporan. Wewenang komite audit terletak pada pengawasan pergantian auditor eksternal perusahaan yang ditetapkan oleh komisaris dalam RUPS. Pergantian auditor terkadang dilakukan untuk memusnahkan temuan penyelewengan yang diselidiki oleh auditor terdahulu selama periode audit. Namun, akses yang dimiliki komite audit tidak cukup kuat untuk mendeteksi adanya kecurangan oleh auditor terdahulu.

Temuan ini juga selaras dengan penelitian Elnahas et al. (2017) dan Johnson et al. (2021) yaitu komite audit gagal berperan sebagai mediator untuk mendeteksi kecurangan pada pelaporan keuangan berbentuk rasionalisasi. Pergantian kantor akuntan publik tidak dapat memperlemah kemampuan auditor dalam pendeteksian indikasi penyelewengan pada laporan keuangan. Akses yang dimiliki komite audit tidak cukup kuat untuk mendeteksi adanya penyimpangan oleh auditor terdahulu. Oleh karena itu, komite audit hendaknya merekomendasikan penunjukan Kantor akuntan publik yang tergolong *Big Four* dan terkenal dengan kualitas audit yang andal sehingga manipulasi pelaporan keuangan dapat diminimalisasi.

Pengaruh perubahan direksi dengan penyimpangan pada laporan tahunan tidak berhasil dimoderasi oleh komite audit. Pergantian direksi dilaksanakan karena adanya rekrutmen direksi baru yang lebih kompeten dari sebelumnya. Kondisi ini memberikan potensi kepada pihak-pihak berkepentingan untuk melakukan *fraud*. Namun, hal ini tidak dapat dicegah oleh komite audit karena tidak memiliki wewenang atas pergantian ini.

Temuan riset ini didukung oleh riset Elnahas et al. (2017) dan Johnson et al. (2021) yang menjelaskan bahwa komite audit tidak mampu berperan sebagai pemoderasi atas interaksi pergantian direksi pada pemalsuan laporan keuangan. Akan tetapi, temuan ini tidak sependapat dengan Sari et al. (2022) yang mengemukakan bahwa komite audit mampu memperlemah dampak perubahan direktur terhadap indikasi penyimpangan pada laporan keuangan. Manajemen yang memiliki kemampuan memiliki kemungkinan besar untuk melakukan kecurangan pada saat pengelolaan laporan keuangan. Keikutsertaan komite audit dalam proses penyusunan laporan keuangan dapat mengevaluasi kinerja manajemen sehingga laporan keuangan yang dipublikasikan terhindar dari tindak kecurangan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengangkat

anggota komite audit dengan latar belakang pendidikan keuangan atau akuntansi yang baik demi optimalnya fungsi pengawasan.

Pencegahan penyimpangan laporan keuangan oleh banyaknya gambar CEO gagal dimoderasi komite audit. Dalam melaksanakan pemeriksaan, komite audit memusatkan pengawasan kinerja manajemen pada temuan audit dan pencatatan pelaporan keuangan. Peran aktif seorang CEO dalam partisipasi acara perusahaan sebagai dokumentasi di laporan tahunan menunjukkan sikap arogansi yang tidak dapat dideteksi oleh komite audit. Komite audit berperan penting dalam mengawasi proses penyusunan laporan keuangan dan memeriksa temuan audit. Namun, sikap arogansi CEO yang dipresentasikan dalam laporan tahunan tidak dapat dideteksi oleh komite audit. Peran optimal komite audit tidak dapat menghilangkan ego besar manajer untuk melakukan kecurangan. Oleh karena itu, perusahaan perlu membatasi kuantitas gambar CEO yang ditampilkan pada laporan tahunan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Meskipun CEO memiliki jabatan tertinggi, komite audit harus memastikan CEO mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Komite audit gagal sebagai pemoderasi antara pengaruh hubungan politik pada kecurangan penyusunan laporan. Komite audit sulit mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan apabila manajemen bekerja sama dengan banyak pihak untuk memanipulasi jejak transaksinya. Manajemen yang berkolusi tidak akan memberikan semua informasi kepada komite audit sehingga komite audit mengalami kesulitan untuk mendeteksi jejak penyelewengan laporan keuangan (Woidtke et al., 2013; Xiao et al., 2021).

Temuan ini sesuai dengan saran Brazel (2018) dan Lauck et al. (2020) bahwa Komite audit perlu memperhatikan kewajaran hubungan kedekatan jajaran perusahaan dengan pemerintahan atau politisi, khususnya yang memiliki rangkap jabatan. Isu-isu politik mengenai manajemen juga perlu diwaspadai terutama sentimen negatif yang kemungkinan memiliki keterkaitan dengan perusahaan (Aubert et al., 2019; Hobson et al., 2017; Sari et al., 2022). Tanggung jawab dan transparansi sistem *good corporate governance* terletak pada komite audit sebagai pencegahan penyelewengan pada laporan keuangan.

## SIMPULAN

Temuan penelitian berdasarkan elemen kecurangan *hexagon theory* membuktikan tekanan, rasionalisasi, dan arogansi dapat mengindikasikan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. Pengindikasian penyimpangan pada laporan keuangan dapat dilakukan dengan melihat kualitas akrual dan posisi keuangan perusahaan. Apabila kualitas akrual perusahaan meningkat, maka perusahaan diduga telah melakukan kecurangan. Keberadaan dan kuantitas komite audit sebagai dewan pengawas tidak memiliki



wewenang yang cukup tinggi untuk mendeteksi adanya penyelewengan pada saat penyusunan laporan keuangan.

Penelitian ini menemukan prioritas dalam pencegahan kecurangan atas laporan keuangan yakni tuntutan pemegang kepentingan kepada manajemen, frekuensi pergantian kantor akuntan publik, dan kuantitas foto CEO dalam laporan tahunan. Kontrol kewajiban atau perjanjian hutang perusahaan yang baik berdampak pada penurunan tekanan yang dirasakan manajemen. Pergantian auditor eksternal wajib dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yaitu paling lama 6 tahun. Penekanan sikap superioritas dilakukan dengan pembatasan jumlah maksimal foto CEO yang ditampilkan pada laporan tahunan. Para investor perlu berhati-hati dalam menganalisis informasi laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan dengan mencermati risiko salah saji laporan keuangan sesuai variabel yang sudah diteliti. Perusahaan juga perlu mengawasi secara ketat proses penyusunan dan kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang ditentukan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada keluarga tersayang, Universitas Prima Indonesia dan Jurnal Akuntansi Multiparadigma yang telah membantu dalam proses publikasi jurnal ini.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Aboud, A., & Robinson, B. (2022). Fraudulent Financial Reporting and Data Analytics: An Explanatory Study from Ireland. *Accounting Research Journal*, 35(1), 21–36. <https://doi.org/10.1108/ARJ-04-2020-0079>
- Akomea-Frimpong, I., Andoh, C., Akomea-Frimpong, A., & Dwomoh-Okudzeto, Y. (2019). Control of Fraud on Mobile Money Services in Ghana: An Exploratory Study. *Journal of Money Laundering Control*, 22(2), 300–317. <https://doi.org/10.1108/JMLC-03-2018-0023>
- Aksa, A. F., Irianto, B. S., & Bawono, I. R. (2020). The Urgency of Rationalization for Unethical Behavior and Accounting Fraud. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 653–664. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.37>
- Albizri, A., Appelbaum, D., & Rizzotto, N. (2019). Evaluation of Financial Statements Fraud Detection Research: A Multi-Disciplinary Analysis. *International Journal of Disclosure and Governance*, 16(4), 206–241. <https://doi.org/10.1057/s41310-019-00067-9>
- Apriliansa, S., & Agustina, L. (2017). The Analysis of Fraudulent Financial Reporting Determinant through Fraud Pentagon Approach. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(2), 154–165. <https://doi.org/10.15294/jda.v7i1.4036>
- Aubert, F., Wang, J. J., & Grudnitski, G. (2019). Convergence Consensus Analyst Earnings Estimates and Option Pricing in Modeling Material Accounting Misstatements. *Review of Accounting and Finance*, 18(1), 134–156. <https://doi.org/10.1108/raf-05-2017-0101>
- Avery, S. (2020). For Fraud, Look under ‘Serious and Organized Crime. *Public Money and Management*, 40(5), 407–414. <https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1714903>
- Brazel, J. F. (2018). Do Auditors and Audit Committees Lower Fraud Risk by Constraining Inconsistencies between Financial and Nonfinancial Measures? *Current Issues in Auditing*, 12(2), P7–P15. <https://doi.org/10.2308/ciia-52258>
- Chen, K. S., & Tsai, H. (2018). Taxing the Rich Policy, Evasion Behavior, and Portfolio Choice: A Sustainability Perspective. *Cogent Business and Management*, 5(1), 1526362. <https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1526362>
- Cuganesan, S., & Free, C. (2021). Employees’ Identification and Management Control Systems: A Case Study of Modern Policing. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 34(1), 31–53. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2020-4490>
- Elnahas, A. M., Jain, P. K., & McInish, T. H. (2017). Exploring the Manipulation Toolkit: The Failure of Doral Financial Corporation. *Applied Economics*, 50(2), 157–171. <https://doi.org/10.1080/00036846.2017.1319563>
- Hamilton, E. L., & Smith, J. L. (2021). Error or Fraud? The Effect of Omissions on Management’s Fraud Strategies and Auditors’ Evaluations of Identified Misstatements. *The Accounting Review*, 96(1), 225–249. <https://doi.org/10.2308/tar-2017-0355>
- He, L., Conyon, M. J., & Chen, J. (2020). Signaling via Earnings Downgrades: How Reputational Concerns Shape Analyst Responses to Corporate Fraud? *Corporate Governance: An International Review*, 28(4), 240–263. <https://doi.org/10.1111/corg.12322>
- Hidayah, N. E. F., & Rahmawati. (2019). Manfaat Laba untuk Menambah Utang dan Mengurangi Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 262–275. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10015>
- Hobson, J. L., Mayew, W. J., Peecher, M. E., & Venkatachalam, M. (2017). Improving Experienced Auditors’ Detection of Deception in CEO Narratives. *Journal of Accounting Research*, 55(5), 1137–1166. <https://doi.org/10.1111/1475-679x.12181>
- Johnson, E. N., Lowe, D. J., & Reckers, P. M. J. (2021). The Influence of Auditor Narcissism and Moral Disengagement on Risk Assessments of a Narcissistic Client CFO. *Journal of Accounting and Public Policy*, 40(4), 106826. <https://doi.org/10.1016/j.jacpubpol.2021.106826>
- Khamainy, A. H., Ali, M., & Setiawan, M. A. (2022). Detecting Financial Statement

- Fraud through New Fraud Diamond Model: The Case of Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 29(3), 925-941. <https://doi.org/10.1108/JFC-06-2021-0118>
- Koong, K. S., Liu, L. C., Qin, H., & Ying, T. (2017). Occurrences of Online Fraud Complaints: 2002 through 2015. *International Journal of Accounting & Information Management*, 25(4), 484-504. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-12-2016-0113>
- Kusumawati, E., Yuliantoro, I. P., & Putri, E. (2021). Pentagon Fraud Analysis in Detecting Fraudulent Financial Reporting. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 6(1), 78-93. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v6i1.14646>
- Lauck, J. R., Perreault, S. J., Rakestraw, J. R., & Wainberg, J. S. (2020). Strategic Audit Inquiry: The Impact of Timing and the Promotion of Statutory Protections on Client Fraud Disclosures. *Accounting Horizons*, 34(3), 153-167. <https://doi.org/10.2308/horizons-18-101>
- Marriott, L., & Sim, D. (2017). Tax Evasion and Welfare Fraud: Do Punishments Fit the Crime or the Perception of the Crime? *Pacific Accounting Review*, 29(4), 573-589. <https://doi.org/10.1108/PAR-10-2016-0094>
- Murphy, R. (2019). 'Corporate Tax Avoidance: Is Tax Transparency the Solution?': A Practitioner View. *Accounting and Business Research*, 49(5), 584-586. <https://doi.org/10.1080/00014788.2019.1611728>
- Nasir, N. A. B. M., Ali, M. J., Razzaque, R. M., & Ahmed, K. (2018). Real Earnings Management and Financial Statement Fraud: Evidence from Malaysia. *International Journal of Accounting & Information Management*, 26(4), 508-526. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-03-2017-0039>
- Nigrini, M. J. (2019). The Patterns of the Numbers Used in Occupational Fraud Schemes. *Managerial Auditing Journal*, 34(5), 602-622. <https://doi.org/10.1108/MAJ-11-2017-1717>
- Oats, L., & Tuck, P. (2019). Corporate Tax Avoidance: Is Tax Transparency the Solution? *Accounting and Business Research*, 49(5), 565-583. <https://doi.org/10.1080/00014788.2019.1611726>
- Puspita, A. F., Pusposari, D., & Firmanto, Y. (2021). Apakah Teori Fraud Pentagon Relevan Dalam Mendeteksi Penggelapan Pajak? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 531-546. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.3.30>
- Ramadhan, M. S., & Mulyati. (2022). Optimalkah Proses Audit Forensik dan Investigasi selama Covid-19? *Jurnal Akuntansi Multi-paradigma*, 13(2), 263-276. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2022.13.2.20>
- Ratmono, D., & Frendy. (2022). Examining The Fraud Diamond Theory through Ethical Culture Variables: A Study of Regional Development Banks in Indonesia. *Cogent Business and Management*, 9(1), 2117161. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2117161>
- Sahdan, M. H., Cowton, C. J., & Drake, J. E. (2020). Forensic Accounting Services in English Local Government and the Counter-fraud Agenda. *Public Money and Management*, 40(5), 380-389. <https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1714208>
- Sahla, W. A., & Ardianto, A. (2022). Ethical Values and Auditors Fraud Tendency Perception: Testing of Fraud Pentagon Theory. *Journal of Financial Crime*, 29, 1359-1790. <https://doi.org/10.1108/JFC-04-2022-0086>
- Salehi, M., & Salami, S. (2020). Corporate Tax Aggression and Debt in Iran. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(1), 257-271. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2016-0127>
- Sari, M. P., Mahardika, E., Suryandari, D., Raharja, S., & Ntim, C. G. (2022). The Audit Committee as Moderating the Effect of Hexagon's Fraud on Fraudulent Financial Statements in Mining Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange. *Cogent Business & Management*, 9(1), 2150118. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2150118>
- Scotter, J. R. V., & Roglio, K. D. D. (2018). CEO Bright and Dark Personality: Effects on Ethical Misconduct. *Journal of Business Ethics*, 164(3), 451-475. <https://doi.org/10.1007/s10551-018-4061-5>
- Setiawati, E., & Baningrum, R. M. (2018). Deteksi Fraudulent Financial Reporting Menggunakan Analisis Fraud Pentagon: Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Listed di BEI Tahun 2014-2016. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 91-106. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i2.6645>
- Siahaan, M., Suharman, H., Fitrijanti, T., & Umar, H. (2023). Will the Integrated GRC Implementation Be Effective Against Corruption? *Journal of Financial Crime*, 30(1), 24-34. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2021-0275>
- Skidmore, M., Goldstraw-White, J., & Gill, M. (2020). Understanding the Police Response to Fraud: The Challenges in Configuring a Response to a Low-priority Crime on the Rise. *Public Money and Management*, 40(5), 369-379. <https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1714203>
- Sun, J., Kent, P., Qi, B., & Wang, J. (2017). Chief Financial Officer Demographic Characteris-

- tics and Fraudulent Financial Reporting in China. *Accounting & Finance*, 59(4), 2705–2734. <https://doi.org/10.1111/acfi.12286>
- Tu, T., & Turner, M. (2019). Tax as an Option to Fund The Proposed National Health Insurance Fund: What Do Knowledgeable Individuals Think? *South African Journal of Accounting Research*, 33(1), 1-20. <https://doi.org/10.1080/10291954.2019.1600236>
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing Theory of Fraud: The S.C.O.R.E. Model. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 372–381. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>
- Wardani, D. K., & Susilowati, W. T. (2020). Urgensi Transparansi Informasi dalam Perlawanan Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1). <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.1.08>
- Wei, Y., Chen, J., & Wirth, C. (2017). Detecting Fraud in Chinese Listed Company Balance Sheets. *Pacific Accounting Review*, 29(3), 356–379. <https://doi.org/10.1108/PAR-04-2016-0044>
- Woidtke, T., & Yeh, Y. H. (2013). The Role of the Audit Committee and the Informativeness of Accounting Earnings in East Asia. *Pacific Basin Finance Journal*, 23, 1–24. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2012.12.002>
- Xiao, J., Sun, S. L., & Weng, D. H. (2021). The Unfriendly Board: Antecedents and Consequences of Board Dissent. *European Management Journal*, 39(1), 135–146. <https://doi.org/10.1016/j.emj.2020.10.002>
- Zhou, F., Zhang, Z., Yang, J., Su, Y., & An, Y. (2018). Delisting Pressure, Executive Compensation, and Corporate Fraud: Evidence from China. *Pacific Basin Finance Journal*, 48, 17–34. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2018.01.003>